



INDONESIA INDICATOR

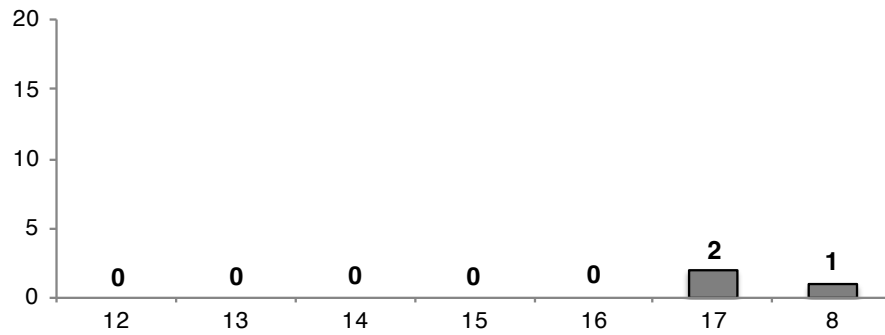
LAPORAN MEDIA CETAK

**Wakil Gubernur Jawa Tengah
(18 Juli 2025)**

Summary

Media	News	Positive	Neutral	Negative
1	1	1	0	0

Daily Statistic



Media Share

-

Influencers

-

Table Of Contents : 18 Juli 2025

No	Date	Media	News Title	Page	Sentiment	Influencers
1	18 Juli 2025	Suara Merdeka	Pemprov Sisir Beras Oplosan	1	Positive	

Title	Pemprov Sisir Beras Oplosan		
Media	Suara Merdeka	Reporter	ekd,dtc,mer-25
Date	2025-07-18	Tone	Positive
Page	1	PR Value	

Pemprov Sisir Beras Oplosan

■ Dilarang Beredar di Jateng

SEMARANG - Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, menegaskan praktik pengoplosan beras tidak dapat dibenarkan, baik dari sisi agama maupun aturan negara.

Pemprov siapkan tim untuk melakukan penyisiran di pasaran. Hal itu disampaikan Taj Yasin saat menanggapi isu beras premium oplosan yang berkembang luas di sejumlah media.

"Kalau soal beras oplosan, dari sisi agama jelas tidak dibolehkan karena tidak memenuhi prinsip *halalan thayyiban* (halal dan baik). Harus ada

(Bersambung hlm 5 kol 1)



SM/jatengprov.go.id

BERIKAN KETERANGAN : Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin memberikan keterangan terkait isu beras premium oplosan di kantornya, Kamis (17/7). (55)

Pemprov...

(Sambungan hlm 1)

kejelasan asal-usul dan kualitasnya. Dari sisi negara pun, ini tidak diperbolehkan," tandasnya, Kamis (17/7).

Ia menambahkan, Pemprov mengajak masyarakat untuk tidak terlibat dalam praktik peredaran beras oplosan dalam bentuk apa pun. Selain merugikan konsumen, hal itu juga berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem distribusi pangan.

"Ini merugikan. Kita capek-capek membangun kepercayaan dan ketahanan pangan, tapi ternyata ada pihak yang sengaja mengurangi kualitas dengan cara oplosan. Ini tidak bisa dibiarkan," tegasnya.

Langkah Antisipasi

Taj Yasin mengungkapkan, Pemprov telah mengarahkan tim untuk turun ke lapangan guna melakukan pemantauan dan penyisiran di pasar-pasar.

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan kasus langsung di wilayah Jawa Tengah, langkah antisipasi tetap dilakukan.

"Sudah ada tim yang ke lapangan. Begitu ada informasi, pasti kami tindak lanjuti. Kalau nanti ditemukan, pasti akan kami proses. Tapi ini bukan hanya tugas Pemprov. Ada Satgas Pangan yang turut mengawasi," ujarnya.

Menurutnya, Pemprov secara intens melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk mengatasi persoalan tersebut. "Kami sudah punya Satgas

Pangan di daerah dan akan terus berkoordinasi dengan unsur pusat. Kalau ada temuan, tentu akan diproses sesuai aturan," pungkasnya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jateng meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras oplosan seperti daftar merek yang disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan). Dari hasil pemantauan diperkirakan beras oplosan dijual di luar pasar tradisional.

"Kemungkinan beras oplosan itu ada di luar pasar. Nanti penindakan dari ranah hukum. Mungkin bisa ditelusuri melalui dinas kabupaten/kota untuk menjaga kelancaran konsumen," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindag Jateng, Sucahyo, Kamis (17/7)..(ekd,dtc,mer-25)